



LAPORAN TAHUNAN SUSREG 2022

PENILAIAN TERHADAP REGULASI KEUANGAN
BERKELANJUTAN DAN AKTIVITAS BANK SENTRAL

Penulis: Adam Ng, Siti Kholifatul Rizkiah, Maud Abdelli

Kerangka kerja Regulasi Keuangan Berkelanjutan dan Aktivitas Bank Sentral (SUSREG) merupakan upaya kolaboratif. Para penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim keuangan berkelanjutan Deloitte Swiss (Jérôme Crugnola-Humbert, Kaja Brodtkorb, Antoine Wannier, Greta Cenotti, Maya Dyuzhakova, Aylin Noorda, Simon Heller, dan Marcel Meyer) atas dukungan mereka dalam inisiatif SUSREG.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua rekan WWF atas kontribusi mereka di berbagai tahap proyek, khususnya kepada, Fatim Nabilah Fatah, Ristiyantri Hayu Pertiwi, Pina Saphira, Avital van Meijeren Karp, Maria Fernanda Contreras del Valle, Laurence Picton, Kristina Angelova, Anders Nordheim, Edith Verhoestraete, Carolin Carella, Jochen Krimphoff, Hannes Peinl, Ivo Mugglin, Lennys Rivera, Magnus Emfel, Anshul Mishra, Rizkiasari Yudawinata, Debora Batista, Maxime Garde, Juan Barriga, Mariann Breu, Fungai Musana, Christine Mwangi, dan pihak lain yang tidak berkenan untuk disebutkan namanya.

WWF juga berterima kasih kepada Australian Prudential Regulation Authority, Banco Central Do Brasil, Bank Negara Malaysia, Danmarks Nationalbank, De Nederlandsche Bank, Deutsche Bundesbank, Hong Kong Monetary Authority, dan Reserve Bank of India yang telah memberikan informasi tentang inisiatif mereka saat ini dan yang akan datang, yang dapat ditemukan dalam bagian "wawancara" dari laporan ini.

WWF ingin berterima kasih kepada masing-masing organisasi dan institusi yang telah berkontribusi untuk membuat kerangka kerja dan penilaian SUSREG lebih baik dan menampilkan hasil yang lebih dapat diandalkan, dengan cara menanggapi konsultasi awal dan memberikan umpan balik atas hasil penilaian.

Proyek ini merupakan bagian dari International Climate Initiative (IKI). Kementerian Lingkungan Hidup, Konservasi Alam, Keamanan Nuklir dan Perlindungan Konsumen mendukung inisiatif ini berdasarkan keputusan yang diadopsi oleh Parlemen Republik Federal Jerman.

Didukung oleh:



Laporan ini merupakan bagian dari:

WWF Greening Financial Regulation Initiative (https://wwf.panda.org/discover/our_focus/finance/greening_financial_regulation/)

Asia Sustainable Finance Initiative (www.asfi.asia)

Produksi dan desain:

Sweeta Patel (www.thecornershop.me)

Diterbitkan bersama pada Desember 2022 oleh WWF - World Wide Fund for Nature, Swiss dan WWF - World Wide Fund for Nature, Singapura.

Setiap reproduksi secara keseluruhan atau sebagian harus mencantumkan judul dan kredit penerbit yang disebutkan di atas sebagai pemilik hak cipta.

Foto Sampul:


©Shutterstock - Sylvie Corriveau

WWF adalah salah satu lembaga konservasi yang paling berpengaruh dan berpengalaman di dunia, dengan lebih dari 5 juta pendukung dan jaringan global yang aktif di lebih dari 100 negara. Misi WWF adalah menghentikan degradasi lingkungan alam di planet ini dan membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam. WWF telah bekerja dengan sektor keuangan selama lebih dari satu dekade melalui kolaborasi inovatif yang bertujuan mengintegrasikan risiko dan peluang ESG ke dalam praktik keuangan secara umum, guna merealokasikan aliran pembiayaan yang mendukung agenda pembangunan berkelanjutan global. Melalui Greening Financial Regulation Initiative (GFRI), WWF terlibat secara khusus dengan bank sentral, otoritas keuangan, serta regulator di bidang asuransi untuk mendorong integrasi secara penuh risiko iklim, lingkungan, dan sosial ke dalam mandat dan operasi mereka. GFRI secara rutin memantau perkembangan integrasi dimaksud oleh bank sentral dan otoritas keuangan melalui SUSREG. GFRI juga melakukan penelitian dengan menggunakan keahlian internal dan mitra eksternal, serta menawarkan bantuan teknis, pelatihan, dan lokakarya yang ditujukan untuk otoritas keuangan, bank sentral, dan pembuat kebijakan, menggunakan data, alat, dan metodologi berbasis ilmiah. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi situs web kami di panda.org/gfr atau hubungi sekretariat kami melalui gfr@wwf.ch

Hak Cipta © 2022 WWF-Switzerland dan WWF-World Wide Fund for Nature (Singapore) Limited



© Shutterstock - blueeyes

A background image of several aloe vera leaves, showing their characteristic serrated edges and thick, fleshy texture. The leaves are arranged in a cluster, with some pointing upwards and others downwards, creating a sense of depth and natural growth. The overall color palette is a mix of light and dark greens, with some blueish tones in the shadows.

**“INDEKS LIVING PLANET TAHUN 2022
MENUNJUKKAN RATA-RATA PENURUNAN
POPULASI SATWA LIAR YANG DIPANTAU
ANTARA TAHUN 1970 DAN 2018
SEBESAR 69% SECARA GLOBAL. JIKA
KITA TIDAK BERUPAYA MELESTARIKAN
DAN MEMULIHKAN KEANEKARAGAMAN
HAYATI, SERTA MEMBATASI PERUBAHAN
IKLIM YANG DISEBABKAN OLEH MANUSIA,
BERPOTENSI TERHADAP PENCAPAIAN
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(SDGS) YANG TIDAK AKAN TERWUJUD.”**

**LAPORAN LIVING PLANET 2022:
MEMBANGUN MASYARAKAT NATURE-POSITIVE
OKTOBER 2022**

RINGKASAN EKSEKUTIF

“DAMPAK NEGATIF PADA LINGKUNGAN YANG TERJADI HARI INI MERUPAKAN RISIKO KEUANGAN DI MASA DEPAN, SEDANGKAN LAMBANNYA RESPONS TERHADAP PERUBAHAN IKLIM DAN HILANGNYA KEANEKARAGAMAN HAYATI AKAN MEMPERBURUK SITUASI.”

PETA JALAN BANK SENTRAL DAN OTORITAS KEUANGAN WWF: TRANSISI KE EKONOMI BERBASIS NET-ZERO DAN NATURE-POSITIVE | SEPTEMBER 2022

Saat ini, bank sentral dan otoritas sektor keuangan di seluruh dunia tengah berada di sebuah momentum yang menguat untuk berperan dalam mengatasi perubahan iklim dan menanggulangi kerusakan alam. Perubahan iklim dan kerusakan alam adalah pendorong utama risiko keuangan yang berdampak pada stabilitas harga dan pasar, sehingga harus ditangani sebagai bagian integral dari mandat bank sentral dan otoritas keuangan. Di beberapa yurisdiksi, studi awal tentang paparan sistem keuangan terhadap lingkungan alam di berbagai sektor secara umum menunjukkan adanya implikasi ekonomi makro dan finansial yang signifikan.

Sementara itu di berbagai yurisdiksi baru dan berkembang, panduan taksonomi kegiatan berkelanjutan telah diluncurkan untuk membantu lembaga keuangan mengidentifikasi dan mengevaluasi pembiayaan dan investasi yang memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terkait iklim dan lingkungan. Meskipun demikian, baik parameter dan ambang batas berbasis sains/ilmiah maupun taksonomi 'coklat' tidak sepenuhnya tersedia sebagai pelengkap yang diperlukan untuk taksonomi 'hijau'. Hal ini membahayakan tidak hanya pada stabilitas keuangan pasar dan solvabilitas lembaga keuangan yang berada dalam pengawasan mereka, tetapi juga seluruh kesejahteraan dan kemakmuran umat manusia di masa depan.

Sebagai organisasi konservasi global berbasis ilmu pengetahuan, WWF, melalui Greening Financial Regulation Initiative (GFRI)¹ bekerja sama dengan bank sentral dan otoritas

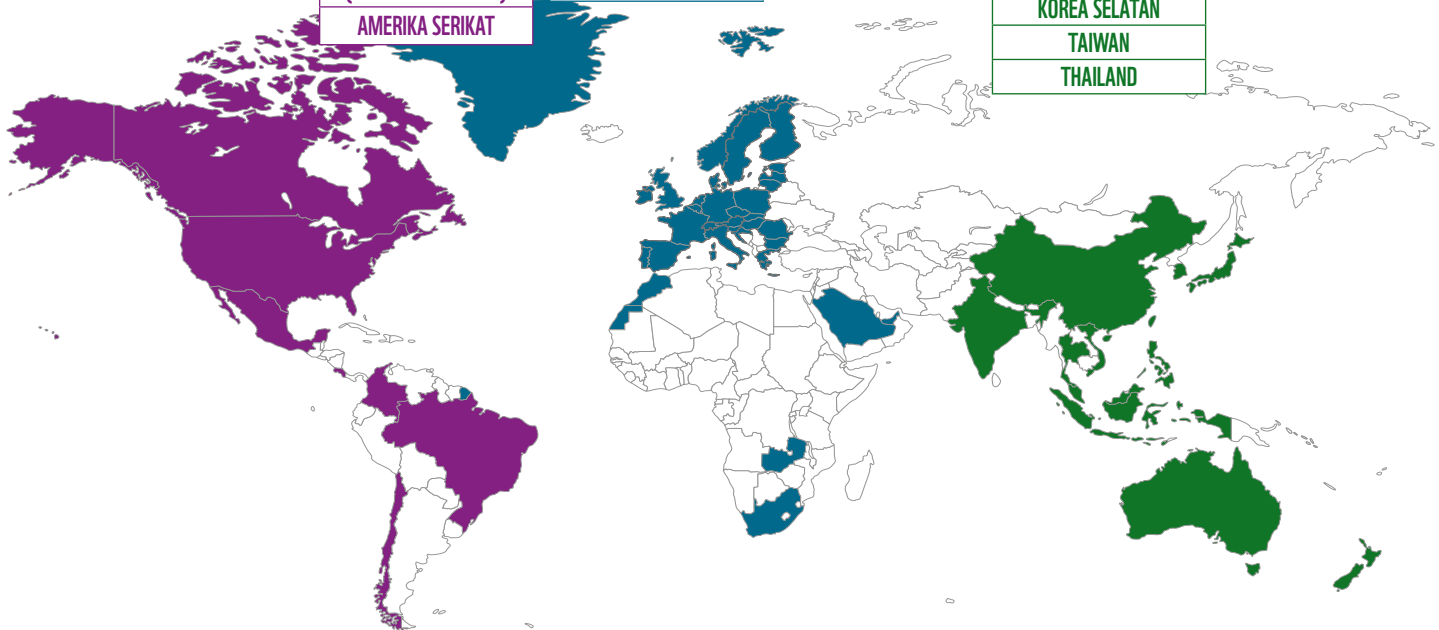
dan pengawas keuangan di seluruh dunia untuk memastikan sistem keuangan sepenuhnya memperhitungkan risiko terkait iklim dan lingkungan alam, serta menjadi kekuatan pendorong bagi ekonomi berbasis net zero dan nature-positive. Pada bulan September tahun ini, WWF dan lebih dari 90 organisasi (termasuk think tank dan tokoh berpengaruh di dunia akademik dan keuangan) telah menyerukan kepada bank sentral dan otoritas keuangan untuk bertindak sebagai agen pencegahan dalam mengatasi krisis kembar (the twin crises) yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati.² Peta Jalan Bank Sentral dan Otoritas Sektor Keuangan^{3, 4} yang diluncurkan oleh GFRI membantu merumuskan langkah-langkah nyata bagi bank sentral dan otoritas sektor keuangan dalam transisi menuju ekonomi berbasis net zero dan nature-positive.

WWF memantau dan melaporkan kemajuan yang dicapai setiap tahun melalui SUSREG Tracker⁵ dan Laporan Tahunan SUSREG untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana bank sentral dan otoritas keuangan mengatasi krisis kembar dan mengintegrasikan risiko lingkungan dan sosial (E&S) ke dalam aktivitas dan operasi sehari-hari mereka. Tahun ini, laporan tahunan SUSREG juga mencantumkan sejumlah praktik regulasi atau pengawasan yang baik, serta mengidentifikasi kesenjangan dalam regulasi keuangan hijau dan bank sentral yang harus dibenahi untuk mencapai ekonomi nature-positive. Penilaian SUSREG tahun ini diperluas hingga mencakup regulasi yang berkaitan dengan industri asuransi guna mempertimbangkan adanya kemajuan yang dicapai oleh regulator dan lembaga pengawas di bidang asuransi.

“NGFS MENGAKUI BAHWA RISIKO TERKAIT LINGKUNGAN ALAM, TERMASUK YANG TERKAIT DENGAN HILANGNYA KEANEKARAGAMAN HAYATI, DAPAT MEMILIKI IMPLIKASI EKONOMI MAKRO YANG SIGNIFIKAN. KEGAGALAN UNTUK MEMPERHITUNGKAN, MEMITIGASI, DAN BERADAPTASI TERHADAP IMPLIKASI INI MERUPAKAN SUMBER RISIKO BAGI LEMBAGA KEUANGAN SECARA INDIVIDU MAUPUN TERHADAP STABILITAS KEUANGAN. OLEH KARENA ITU, BANK SENTRAL DAN OTORITAS SEKTOR KEUANGAN HARUS MEMPERTIMBANGKAN BERBAGAI RISIKO INI SECARA MEMADAI UNTUK MEMENUHI MANDAT MEREKA.”

MANDAT “HILANGNYA KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN RISIKO LINGKUNGAN ALAM” GUGUS TUGAS NGFS | APRIL 2022 / APRIL 2024

AMERIKA	EMEA/ Eropa, Timur Tengah dan Afrika		APAC/ Asia Pasifik
BERMUDA	DENMARK	NORWEGIA	AUSTRALIA
BRAZIL	UNI EROPA	PORTUGAL	TIONGGOK
CALIFORNIA (NEGARA BAGIAN AS)	PRANCIS	ARAB SAUDI	HONG KONG
KANADA	JERMAN	AFRIKA SELATAN	INDIA
CHILI	YUNANI	SPANYOL	INDONESIA
KOLOMBIA	HUNGARIA	SWEDIA	JEPANG
KOSTA RIKA	ITALIA	SWISS	MALAYSIA
MEKSIKO	KENYA	UNI EMIRAT ARAB	SELANDIA BARU
NEW YORK (NEGARA BAGIAN AS)	LUKSEMBURG	INGGRIS	FILIPINA
AMERIKA SERIKAT	MAROKO	ZAMBIA	SINGAPURA
	BELANDA		KOREA SELATAN
			TAIWAN
			THAILAND



Cakupan penilaian telah diperluas dari 38 yurisdiksi di 2021 menjadi 44 yurisdiksi pada tahun 2022 di seluruh Amerika, EMEA (Eropa, Timur Tengah, dan Afrika), dan APAC (Asia Pasifik), yang mewakili lebih dari 88% PDB global dan 72% emisi GRK global, dan 11 dari 17 negara dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Sebagian besar dari subjek penilaian adalah anggota dan pengamat dari Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), International

Association of Insurance Supervisors (IAIS), serta Network of Central Banks and Supervisor for Greening the Financial System (NGFS). Empat puluh dua yurisdiksi tersebut dinilai dari sektor perbankan maupun asuransi (Arab Saudi dan Zambia hanya dinilai pada sektor perbankan, sedangkan Bermuda dan Taiwan hanya pada sektor asuransi).

“ SAAT INI, TIDAK ADA SATUPUN SEKTOR KORPORASI DI NEGARA G7 YANG MEMENUHI SASARAN AMBANG BATAS PEMANASAN GLOBAL 1,5°C SESUAI DENGAN PERJANJIAN PARIS. ”

TIDAK MENCAPI SASARAN: ANALISIS GLOBAL TAHUN 2022
PERINGKAT TEMPERATUR CDP | SEPTEMBER 2022

TIGA BELAS REKOMENDASI UNTUK DIPERTIMBANGKAN DALAM JANGKA PENDEK (PERSYARATAN MINIMUM UNTUK BANK SENTRAL DAN OTORITAS KEUANGAN)



INTEGRASI RISIKO DAN PELUANG LINGKUNGAN DAN SOSIAL DALAM KESELURUHAN STRATEGI DAN PETA JALAN

01.	<p>Menerbitkan rencana transisi menuju ekonomi rendah karbon dan nature-positive: Bank sentral dan otoritas keuangan perlu memberi contoh dan menerbitkan rencana transisi mereka sendiri (dengan mencantumkan sasaran kuantitatif terkait iklim dan keanekaragaman hayati untuk tahun 2025, 2030, dan 2050 yang mencakup seluruh aktivitas bank sentral, regulasi keuangan, dan kegiatan pengawasan) sebagai panduan bagi para pelaku pasar di sektor keuangan. Hal ini perlu diperkuat dengan langkah-langkah dalam berkontribusi pada sektor keuangan berbasis net zero dan nature-positive yang sejalan dengan mandat kedua institusi tersebut. Bank sentral dan otoritas keuangan mewajibkan semua lembaga keuangan di bawah pengawasan mereka untuk menerbitkan rencana tahunan yang terperinci tentang transisi menuju net zero dan nature-positive yang berhubungan dengan semua praktik investasi, pinjaman, dan penjaminan.</p>
02.	<p>Menetapkan secara resmi jangkar nominal terkait iklim dan lingkungan berbasis sains: Bank sentral perlu secara resmi menetapkan jangkar nominal pada besaran 1,5°C atau di bawah 2°C sebagai bagian dari tujuan kebijakan mereka, yang didukung oleh rencana untuk mencapai ekonomi berbasis net zero CO₂ emission pada tahun 2050. Bank sentral juga harus menetapkan jangkar nominal 'pemulihan penuh keanekaragaman hayati pada tahun 2050' sebagai bagian dari tujuan kebijakan mereka yang didukung oleh rencana untuk mencapai ekonomi nature-positive pada tahun 2030.</p>
03.	<p>Mengintegrasikan risiko dan peluang terkait lingkungan alam: Bank sentral harus mempertimbangkan iklim dan lingkungan alam sebagai kesatuan krisis kembar (twin crisis) dan memastikan implementasi kebijakan moneter mereka tidak berkontribusi terhadap perubahan iklim dan kerusakan alam. Otoritas keuangan juga perlu menghentikan kontribusi sektor keuangan terhadap perubahan iklim dan kerusakan alam dengan menggunakan alat kebijakan yang tersedia di tingkat mikro dan makro. Hilangnya pohon dan vegetasi lainnya tidak hanya menjadi penyebab berbagai fenomena yang memperparah perubahan iklim dan kerusakan alam (hilangnya habitat satwa liar, peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK), gangguan siklus air, dan erosi tanah) tetapi juga membahayakan ekonomi dan kesehatan. Bank sentral dan otoritas keuangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghentikan deforestasi, memastikan lembaga-lembaga yang diawasi tidak terlibat dalam deforestasi, serta meminta lembaga keuangan untuk menjelaskan apakah dan bagaimana mereka mengintegrasikan isu deforestasi dan konversi habitat yang lebih luas dalam pengambilan keputusan, proses, dan kebijakan manajemen risiko, dengan persyaratan minimum tertentu. Minimal, lembaga keuangan tidak boleh dikaitkan dengan segala jenis hubungan bisnis terkait deforestasi ilegal, konversi Kawasan Keanekaragaman Hayati Utama, Kawasan Lindung, dan Situs Warisan Dunia. Lebih lanjut, bank sentral dan otoritas harus mengembangkan lebih jauh kerangka kerja klasifikasi berbasis risiko untuk sektor dan aset yang terkait dengan risiko kerusakan keanekaragaman hayati, melalui peningkatan data yang diperlukan untuk melakukan pengujian daya tahan (stress testing) dan analisis skenario (scenario analysis) serta merealokasikan aliran modal dari proyek yang berimplikasi negatif terhadap keanekaragaman hayati ke proyek yang berdampak positif. Terakhir, otoritas keuangan perlu menginstruksikan lembaga keuangan untuk melaporkan pengelolaan risiko dan peluang terkait lingkungan alam mereka berdasarkan kerangka kerja Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD).</p>



PENGAWASAN (PERBANKAN DAN ASURANSI)

04.	<p>Menetapkan standar minimum yang jelas untuk pengawasan E&S dan memantulkannya dalam persyaratan pengawasan: Otoritas keuangan harus merencanakan, menetapkan, dan secara terbuka menyatakan ekspektasi minimum agar diketahui secara luas oleh semua lembaga keuangan. Pengawas dan regulator harus menetapkan persyaratan modal minimum atau penambahan modal (dan rasio likuiditas untuk bank) bagi lembaga keuangan guna memasukkan pertimbangan E&S, melalui pendekatan berbasis risiko yang berbeda. Pengawas perlu mempertimbangkan risiko yang lazim melekat pada saat proses pemberian pinjaman oleh bank dan underwriting oleh asuransi kepada perusahaan yang termasuk dalam daftar 'always environmentally harmful' ⁶, dengan menggunakan alat-alat kebijakan yang tersedia (misalnya penetapan batas konsentrasi, kalibrasi modal, persyaratan likuiditas, dll.).</p>
05.	<p>Memanfaatkan sepenuhnya alat-alat kebijakan makroprudensial untuk mencegah risiko sistemik yang dipicu oleh perubahan iklim dan kerusakan alam: Otoritas keuangan perlu mengeluarkan aturan kehati-hatian untuk membatasi paparan lembaga keuangan untuk aktivitas tertentu, guna mencegah dan melindungi dari penumpukan risiko sistemik terkait E&S. Selain itu, persyaratan permodalan khusus bagi bank dan perusahaan asuransi untuk menyiapkan penyangga makroprudensial (macro-prudential buffer) guna mengantisipasi risiko sistemik terkait E&S perlu dipertimbangkan guna mendorong stabilitas keuangan jangka panjang.</p>



PENGAWASAN (PERBANKAN DAN ASURANSI)

06.	<p>Mendorong kewajiban pengungkapan risiko dan peluang terkait iklim dan lingkungan alam: Otoritas keuangan perlu meminta lembaga keuangan untuk memasukkan informasi tentang strategi E&S dan penerapannya dalam Laporan Tahunan mereka, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan secara langsung atau dengan rujukan ke publikasi yang terpisah. Pelaporan tentang perkembangan strategi perlu menyertakan juga informasi tentang kemungkinan tidak tercapainya target beserta rencana alternatif untuk menyelaraskan, menetapkan, dan/atau mengadaptasi kembali strategi mereka. Selain itu, otoritas perlu secara aktif mendukung inisiatif untuk mengatasi masalah ketersediaan dan kualitas data E&S, termasuk mendorong penyediaan solusi sumber terbuka (open-source solutions). Hal ini harus didukung dengan rekomendasi atau tindakan yang konkret dari pihak otoritas dan tidak hanya sebatas pernyataan atau imbauan secara umum. Jaminan terhadap pengungkapan wajib dan kekuatan isi laporan berdasarkan kerangka kerja yang diakui secara internasional, seperti Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) dan TNFD, akan meningkatkan kualitas dan ketersediaan data.</p>
07.	<p>Menetapkan target dan penyalarsan taksonomi: Otoritas keuangan perlu menginstruksikan lembaga keuangan untuk menetapkan target iklim berbasis ilmiah dan berusaha untuk terus mengikuti perkembangan isu terbaru terkait iklim, dalam rangka menyelaraskan portofolio mereka dengan tujuan dari Perjanjian Paris, serta menetapkan target berbasis ilmiah di tingkat portofolio untuk memitigasi dampak negatif terhadap lingkungan selain iklim. Bank diharapkan untuk mengungkapkan kepada publik bagian dari total portofolio pinjaman mereka (serta total portofolio penjaminan bagi perusahaan asuransi) yang konsisten dengan sistem klasifikasi untuk kegiatan berkelanjutan atau tidak berkelanjutan (taksonomi) yang berlaku.</p>
08.	<p>Menerapkan analisis skenario dan penentuan batas kritis: Lembaga keuangan harus senantiasa menilai dan mengelola eksposur mereka terhadap risiko E&S, dengan menggunakan analisis skenario dan pengujian daya tahan (stress testing) yang berwawasan ke depan dan berbasis ilmiah baik untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Skenario tersebut juga harus mengintegrasikan kemungkinan batas kritis fisik, seperti mencairnya lapisan es Greenland atau disintegrasi lapisan es Antartika Barat.</p>



PENGAWASAN (KHUSUS INDUSTRI ASURANSI)

09.	<p>Menerapkan konsistensi antara aset dan liabilitas: Dalam banyak kasus, pengawasan industri asuransi yang terkait dengan isu ekonomi dan sosial (E&S) masih terfokus pada kegiatan investasi perusahaan asuransi daripada kegiatan penjualan produk asuransi mereka. Untuk itu, perlu dikembangkan dan diterapkan ekspektasi pengawasan yang konsisten untuk kedua sisi neraca perusahaan asuransi guna memastikan, misalnya, bahwa perusahaan asuransi tidak terpapar risiko penjaminan untuk aktivitas berbahaya yang secara bertahap mulai dihapus dari portofolio aset mereka.</p>
10.	<p>Mengurangi kesenjangan perlindungan asuransi: Seiring dengan perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, atau berkembangnya penjaminan asuransi yang didukung AI, sebagian besar penduduk (umumnya yang paling rentan) dapat kehilangan akses ke asuransi akibat kenaikan premi atau jaminan ditolak/ ditarik. Pemerintah dan otoritas industri asuransi harus bertindak tegas dalam mengurangi kesenjangan proteksi ini melalui kombinasi skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), mandat asuransi, inovasi produk, serta insentif modal atau pajak.</p>
11.	<p>Memahami peran lembaga reasuransi: Serupa dengan asuransi bank sentral, sistem jaringan perusahaan reasuransi saat ini sebagian besar dimiliki oleh pihak swasta dan terdesentralisasi. Jaringan perusahaan reasuransi umumnya menjadi penanggung terakhir dari beberapa risiko E&S (seperti bencana alam). Otoritas industri asuransi perlu mempelajari peran spesifik dari sistem reasuransi ketika menyangkut masalah E&S dan, sepanjang relevan, memanfaatkan pengetahuan para ahli reasuransi untuk memahami risiko-risiko ini lebih baik.</p>



BANK SENTRAL DAN KEBIJAKAN MONETER

12.	<p>Mengintegrasikan E&S ke dalam kerangka agunan dan pinjaman bersubsidi bank sentral: Bank sentral perlu memanfaatkan alat kebijakan moneter mereka sepenuhnya, tidak hanya untuk mencerminkan risiko yang berasal dari masalah lingkungan dan sosial, tetapi juga untuk memastikan bahwa tindakan mereka telah mendorong transisi ke ekonomi rendah karbon dan lebih berkelanjutan. Kerangka agunan bank sentral harus mempertimbangkan E&S dengan mengintegrasikan metrik historis, berwawasan ke depan, kuantitatif dan kualitatif terkait iklim, lingkungan alam (misalnya, risiko deforestasi dan konversi habitat) dan pertimbangan-pertimbangan sosial. Bank sentral juga perlu menawarkan pinjaman bersubsidi atau jalur pembiayaan kembali yang ditargetkan berdasarkan pertimbangan E&S.</p>
-----	--



EKOSISTEM PENDUKUNG

13.	<p>Menggunakan alat-alat kebijakan seperti taksonomi berbasis ilmiah yang mencakup daftar aktivitas berkelanjutan dan tidak berkelanjutan serta penetapan harga karbon yang efisien: Berbagai alat kebijakan tersebut, jika dirancang dan diimplementasikan secara konsisten dapat menjadi pendorong yang efektif untuk melengkapi dan memperkuat pelaksanaan regulasi lainnya. Regulator dan pembuat kebijakan di sektor keuangan dan non-keuangan harus mendefinisikan dan menerbitkan prinsip serta format laporan pengungkapan risiko dan dampak E&S, dan mewajibkan perusahaan untuk mempublikasikan dokumen tersebut. Selain itu, regulator dan pembuat kebijakan juga perlu meminta perusahaan untuk melakukan pengungkapan emisi GRK tahunan serta dampak terkait lingkungan alam dan sosial, sekaligus mendorong publikasi data rantai pasoknya.</p>
-----	--

KEMAJUAN UTAMA



PERBANKAN DAN ASURANSI

01.	Ekspektasi regulasi atau pengawasan (1.1.0)*: Ekspektasi regulasi atau pengawasan terhadap perbankan berkelanjutan telah diterbitkan dan diterapkan oleh 62% dari seluruh yurisdiksi perbankan dalam sampel penilaian SUSREG pada tahun 2022, dibandingkan dengan hanya 35% pada tahun 2021. Sekitar 62% dari yurisdiksi asuransi yang dinilai juga melakukan hal yang sama.
02.	Strategi bisnis dan risiko (1.2.1): Di seluruh yurisdiksi yang dinilai, 84% lembaga keuangan mengintegrasikan pertimbangan iklim baik secara penuh maupun sebagian ke dalam strategi bisnis dan risiko mereka.
03.	Integrasi dalam kebijakan dan proses (1.3.5): Secara global, 83% otoritas perbankan dan 74% otoritas asuransi yang dinilai memiliki ekspektasi penuh atau sebagian terhadap bank untuk mengintegrasikan iklim di dalam proses dan kebijakan pengambilan keputusan dan manajemen risiko mereka.
04.	Pengungkapan dalam laporan tahunan (1.6.4): Sekitar 70% dari seluruh otoritas perbankan yang dinilai dan 56% dari seluruh otoritas asuransi yang dinilai telah memasukkan setidaknya sebagian ekspektasi pengungkapan terkait masalah iklim, lingkungan, dan/atau sosial.
05.	Insentif penetapan harga (1.4.12, khusus untuk asuransi): Tujuh belas yurisdiksi (termasuk 10 di EMEA, berkat inisiatif di Uni Eropa) mendorong perusahaan asuransi untuk memasukkan insentif penjaminan emisi dan penetapan harga bagi klien mereka sebagai upaya memitigasi risiko E&S.



EKOSISTEM PENDUKUNG

06.	Penetapan harga karbon (3.1.7): Mekanisme penetapan harga karbon diterapkan di 29 dari 44 yurisdiksi yang disurvei (66%). Sembilan yurisdiksi telah memiliki sistem penetapan harga karbon sukarela, skema percontohan, atau mekanisme terbatas untuk penetapan harga karbon.
07.	Strategi keberlanjutan tingkat nasional (3.1.8): Hampir semua yurisdiksi memiliki strategi iklim tingkat nasional, meskipun hanya 20 yurisdiksi yang secara eksplisit memasukkan sektor keuangan ke dalam strategi iklim mereka. Tiga puluh satu yurisdiksi yang dinilai memiliki strategi nasional untuk lingkungan.



© Shutterstock - Henryp982

* Penomoran ini dan yang serupa adalah referensi untuk nomor indikator. Daftar lengkap indikator dapat ditemukan dalam Lampiran 3 dari Laporan Tahunan SUSREG 2022.

KESENJANGAN UTAMA DAN TINDAKAN YANG DIHARAPKAN UNTUK PERBANKAN



PENGAWASAN PERBANKAN

EKSPEKTASI PENGAWASAN	KESENJANGAN (GAPS)	TINDAKAN YANG DIHARAPKAN
PENGAWASAN MIKROPRUDENSIAL: KEBIJAKAN DAN PROSES	<p>Integrasi dengan risiko terkait lingkungan alam (1.3.6): Sekitar 20% yurisdiksi telah memasukkan isu lingkungan alam ke dalam daftar pertimbangan umum, akan tetapi 80% yurisdiksi lain belum memiliki pertimbangan pengawasan sama sekali.</p>	<p>Pihak otoritas perlu mempertanyakan dan menilai bagaimana, bank mengintegrasikan risiko dan dampak terkait lingkungan alam, termasuk deforestasi dan masalah konversi habitat, dalam proses pengambilan keputusan maupun proses dan kebijakan manajemen risiko. Otoritas juga perlu meminta bank untuk mempersiapkan pengungkapan risiko materiil yang timbul terkait lingkungan alam sesuai dengan kerangka TNFD.</p>
	<p>Infrastruktur sistem data dan teknologi informasi (TI)(1.3.11): Di 60% yurisdiksi yang disurvei, belum ditemukan adanya ekspektasi terhadap data terintegrasi dan sistem TI yang mencakup risiko iklim dan lingkungan. Sementara itu, hanya terdapat empat yurisdiksi yang memasukkan ekspektasi terkait masalah sosial.</p>	<p>Pihak otoritas perlu menyampaikan ekspektasi kepada bank untuk mengumpulkan dan menggabungkan data risiko dan dampak E&S secara efektif melalui pengembangan sistem yang terintegrasi ke dalam tata kelola data grup perbankan pada tingkat yang lebih luas serta ke dalam infrastruktur TI mereka.</p>
PENGAWASAN MIKROPRUDENSIAL: RISIKO & DAMPAK PADA PORTOFOLIO	<p>Penetapan target iklim dan lingkungan alam (1.4.4 dan 1.4.5): Saat ini baru dua yurisdiksi yang menerapkan ekspektasi terkait keselarasan dengan Perjanjian Paris, sedangkan penetapan target berbasis ilmiah untuk memitigasi dampak negatif terhadap lingkungan selain iklim hanya berlaku di satu yurisdiksi di seluruh dunia.</p>	<p>Otoritas pengawas harus memiliki ekspektasi terhadap bank agar senantiasa mengikuti perkembangan ilmu terkait iklim yang terkini dan dapat menetapkan target iklim berbasis ilmiah, guna menyelaraskan portofolio mereka dengan tujuan Perjanjian Paris (yang dapat dimanifestasikan melalui penentuan target ambang batas suhu, misalnya di bawah 2°C atau tepat 1,5°C).</p>
PENGAWASAN MIKROPRUDENSIAL (BERBASIS ATURAN)	<p>Persyaratan modal minimum (1.5.2) dan rasio likuiditas (1.5.4): Secara global, penerapan pertimbangan E&S sebagai bagian dari persyaratan modal minimum dan rasio likuiditas masih berada pada tahap perkembangan, serta tidak ada satu pun yurisdiksi yang dinilai telah menerapkan ekspektasi secara lengkap/ "fully met". Terkait persyaratan modal, beberapa yurisdiksi menerapkan ekspektasi secara parsial, yakni ekspektasi tentang iklim di delapan yurisdiksi, ekspektasi terkait masalah lingkungan di empat yurisdiksi, dan ekspektasi tentang masalah sosial di dua yurisdiksi. Dalam hal rasio likuiditas, empat yurisdiksi telah menetapkan ekspektasi secara parsial.</p>	<p>Otoritas perbankan harus segera memasukkan pertimbangan E&S dengan fokus pada sektor yang paling merusak lingkungan (untuk iklim dan energi/ C&E) di dalam perhitungan persyaratan modal minimum maupun penambahan modal (capital add-ons) untuk bank, serta rasio likuiditas (baik rasio cakupan likuiditas atau rasio pendanaan stabil bersih) melalui pendekatan berbasis risiko yang berbeda-beda. Pertimbangan risiko iklim / E&S di dalam perhitungan penentuan modal yang relevan harus dinyatakan secara eksplisit.</p>
PENGUNGKAPAN & TRANSPARANSI	<p>Pengungkapan terhadap taksonomi (1.6.6): Di 60% yurisdiksi di kawasan EMEA, khususnya di Uni Eropa, lembaga perbankan diminta untuk mengungkapkan kepada publik bagian dari total portofolio pinjaman mereka yang selaras dengan sistem klasifikasi aktivitas berkelanjutan atau tidak berkelanjutan (taksonomi); namun, hampir tidak ada ekspektasi serupa yang jelas pada yurisdiksi lainnya.</p>	<p>Diperlukan suatu sistem taksonomi resmi (mencakup aktivitas berkelanjutan dan/atau tidak berkelanjutan) dan bank dianjurkan atau bahkan diwajibkan untuk mengungkapkan kepada publik bagian dari total portofolio pinjaman mereka yang selaras dengan taksonomi tersebut. Taksonomi berperan kunci untuk menciptakan persaingan yang adil di antara lembaga keuangan, oleh karena itu taksonomi lokal atau regional sedapat mungkin perlu diselaraskan secara global.</p>
	<p>Pengungkapan dalam laporan tahunan (1.6.4): Di sebagian besar negara, ekspektasi regulator terhadap pertimbangan E&S ke dalam laporan tahunan bank makin meningkat. Sekitar 70% dari semua negara yang disurvei menyertakan setidaknya sebagian dari ekspektasi seputar masalah iklim, lingkungan, dan/atau sosial. Meskipun demikian, masih sedikit sekali yang menerapkan persyaratan untuk mengungkapkan target yang tidak tercapai serta upaya yang akan diambil. Ekspektasi demikian, lebih banyak diterapkan di kawasan Asia Pasifik dan EMEA daripada di Amerika (di mana tidak ada negara yang telah memenuhi ekspektasi secara penuh).</p>	<p>Oleh karenanya, lembaga perbankan diharapkan menyertakan informasi tentang kemungkinan tidak tercapainya target beserta rencana alternatif untuk menyelaraskan, menetapkan, dan/atau mengadaptasikan strateginya. Selain itu, diperlukan juga adanya pengungkapan wajib berdasarkan kerangka kerja yang diakui secara internasional seperti TCFD dan TNFD.</p>
PENGAWASAN MAKROPRUDENSIAL	<p>Batas eksposur (1.7.5): Saat ini, belum ada otoritas keuangan dalam sampel penilaian yang menerbitkan aturan kehati-hatian untuk membatasi eksposur bank terhadap aktivitas tertentu (di dua yurisdiksi, telah diumumkan sejumlah inisiatif tetapi belum ditemukan realisasi kebijakan tersebut diberlakukan).</p>	<p>Otoritas harus mengeluarkan aturan kehati-hatian untuk membatasi eksposur bank terhadap aktivitas yang paling merusak lingkungan, termasuk target dan rencana penghentian, guna mencegah dan melindungi dari penumpukan risiko sistemik, berdasarkan pertimbangan E&S.</p>
	<p>Risiko E&S sistemik dalam persyaratan modal (1.7.6): Persyaratan permodalan khusus bagi bank untuk menyiapkan penyangga makroprudensial (macro-prudential buffers) terhadap risiko E&S sistemik baru diterapkandi tiga yurisdiksi.</p>	<p>Persyaratan permodalan khusus untuk bank harus menyertakan penyangga makroprudensial (macro-prudential buffers) untuk membatasi eksposur lembaga keuangan terhadap aktivitas tertentu dan mencegah penumpukan risiko E&S sistemik dalam sistem keuangan, khususnya yang berkaitan dengan risiko iklim dan lingkungan.</p>



KEPEMIMPINAN & ORGANISASI INTERNAL

KESENJANGAN	TINDAKAN YANG DIHARAPKAN
<p>Strategi E&S Otoritas (1.8.2): Hanya 17% otoritas keuangan di yurisdiksi yang dinilai telah menerbitkan strategi atau peta jalan (roadmap) iklim resmi yang mencakup rencana transisi berbasis ilmiah (science-based transition plan).</p>	<p>Otoritas keuangan perlu menerbitkan strategi atau peta jalan E&S resmi yang mencakup rencana transisi berbasis ilmiah diikuti dengan langkah-langkah terkait yang berkontribusi pada terwujudnya sektor keuangan berbasis net-zero dan nature-positive, sesuai dengan mandatnya. Selain itu, peta jalan harus mencantumkan definisi eksplisit dari istilah-istilah yang relevan, atau referensi yang jelas ke sumber yang berfungsi sebagai dasar untuk memahami risiko dan dampak terkait E&S.</p>
<p>Inisiatif kualitas data (1.8.8): Hanya 13 otoritas perbankan yang telah mendukung inisiatif peningkatan kualitas data E&S serta memberikan rekomendasi konkret dan tindakan yang diusulkan, sebagian besar berada di kawasan Amerika dan Asia Pasifik. Sepuluh (10) negara lainnya telah menyatakan mendukung secara prinsip tetapi belum memberikan dukungan atau rekomendasi yang konkret dalam bentuk apa pun.</p>	<p>Otoritas perlu secara aktif mendukung inisiatif untuk mengatasi masalah ketersediaan dan kualitas data E&S, termasuk dengan mendorong solusi sumber terbuka (open-source solutions). Ppengungkapan strategi keberkelanjutan secara wajib dan adanya jaminan pelaporan yang kredibel berdasarkan kerangka kerja yang diakui secara internasional seperti TCFD dan TNFD akan meningkatkan kualitas dan ketersediaan data.</p>



BANK SENTRAL

EKSPEKTASI PENGAWASAN	KESENJANGAN (GAPS)	TINDAKAN YANG DIHARAPKAN
KEBIJAKAN MONETER	<p>Kerangka kerja agunan (2.1.2): Sebagian besar kerangka kerja agunan bank sentral di dunia belum menyertakan pertimbangan E&S, terdapat sembilan bank sentral (semuanya berada di kawasan EMEA dan Asia Pasifik) yang saat ini telah memiliki ekspektasi di lingkup ini.</p>	<p>Kerangka kerja agunan bank sentral harus mempertimbangkan E&S dan untuk itu diperlukan integrasi metrik historis dan berwawasan ke depan, kuantitatif maupun kualitatif, terkait iklim dan lingkungan alam (misalnya, deforestasi dan risiko konversi) serta pertimbangan sosial.</p>
	<p>Pinjaman bersubsidi dan bertarget (2.1.4): Kebijakan bank sentral yang menawarkan pinjaman bersubsidi berdasarkan pertimbangan iklim baru ditemukan di dua yurisdiksi kawasan Asia Pasifik. Selain itu, tiga yurisdiksi di kawasan Asia Pasifik dan EMEA memiliki mekanisme serupa tetapi hanya untuk sejumlah kecil sektor/kegiatan pokok dan/ atau dengan perincian terbatas perihal kriteria dan standar yang digunakan.</p>	<p>Bank sentral perlu menawarkan pinjaman bersubsidi atau jalur pendanaan kembali bertarget preferensial (preferential targeted refinancing lines) berdasarkan pertimbangan E&S, dan mempublikasikan informasi tentang kriteria dan standar spesifik yang digunakan. Bank yang sangat terpapar pada risiko terkait iklim atau deforestasi tetapi tidak melakukan upaya yang wajar untuk menghilangkan risiko tersebut (misalnya, tidak ada kebijakan yang jelas), harus dikenakan ketentuan terkait pendanaan kembali yang lebih ketat.</p>
KEPEMIMPINAN & ORGANISASI INTERNAL	<p>Jangkar nominal (2.2.2): Hanya terdapat bank sentral di 6 yurisdiksi yang telah menetapkan jangkar nominal 1,5°C atau jauh di bawah 2°C sebagai bagian dari objektif mereka. Terkait lingkungan, terdapat 2 bank sentral yang menjadikan pemulihan keanekaragaman hayati secara penuh pada tahun 2050 sebagai sasarannya. Sedangkan, untuk aspek sosial, baru 1 bank sentral yang telah menyertakan pertimbangan sosial ke dalam sasaran utamanya.</p>	<p>Oleh karenanya, bank sentral perlu mendefinisikan jangkar nominal terkait iklim dan lingkungan alam yang berbasis ilmiah di luar tujuan konvensional/ tradisional bank saat ini, dan pemerintah harus menetapkan kerangka kerja yang diperlukan bagi bank sentral untuk memfasilitasi hal tersebut.</p>



© Shutterstock – Veres Szilard

KESENJANGAN UTAMA DAN TINDAKAN YANG DIHARAPKAN UNTUK ASURANSI



PENGAWASAN ASURANSI

EKSPEKTASI PENGAWASAN	KESENJANGAN (GAPS)	TINDAKAN YANG DIHARAPKAN
PENGAWASAN MIKROPRUDENSIAL: KEBIJAKAN DAN PROSES	Integrasi risiko terkait lingkungan alam (1.3.6): Secara global, masih sangat jarang ditemukan ekspektasi pengawasan terhadap perusahaan asuransi untuk menyertakan risiko deforestasi ke dalam pengambilan keputusan serta proses dan kebijakan manajemen risiko. Hanya tiga yurisdiksi (semuanya di Asia Pasifik) yang telah menyatakan beberapa ekspektasi di lingkup ini.	Otoritas asuransi perlu menanyakan apakah, dan menilai bagaimana, perusahaan asuransi mengintegrasikan risiko dan dampak terkait lingkungan alam, termasuk masalah deforestasi dan masalah konversi habitat secara meluas, dalam pengambilan keputusan serta proses dan kebijakan manajemen risiko.
PENGAWASAN MIKROPRUDENSIAL: RISIKO & DAMPAK PADA PORTOFOLIO	Penetapan target iklim (1.4.4): Penyertaan target iklim berbasis ilmiah kedalam ekspektasi lembaga otoritas asuransi masih merupakan hal yang tidak umum (hanya 19% dari yurisdiksi yang dinilai telah melakukan hal ini untuk penjaminan dan 14% untuk aktivitas investasi perusahaan asuransi). Perlu dicatat bahwa beberapa yurisdiksi EMEA telah menerapkan ekspektasi yang lebih tinggi dalam penetapan target iklim dalam aktivitas investasi.	Perlu ada ekspektasi bagi perusahaan asuransi untuk senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan iklim terbaru dan menetapkan target berbasis sains guna menyelaraskan portofolio mereka dengan tujuan dari Perjanjian Paris (yang dapat juga dinyatakan sebagai target suhu, misalnya, jauh di bawah 2°C atau 1,5°C).
	Klaim bencana alam alami (1.4.7): Ekspektasi yang jelas terhadap perusahaan asuransi untuk memiliki rencana tanggap khusus (specific response plan) untuk klaim tambahan terkait dengan bencana alam hanya ditemukan di empat yurisdiksi yang dinilai. Salah satu regulasi taksonomi Uni Eropa juga secara tidak langsung mendorong hal ini, sehingga sebagai hasilnya, sebagian yurisdiksi di Uni Eropa telah memenuhi indikator ini.	Dengan kian banyaknya bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kerusakan alam, perusahaan asuransi dan reasuransi perlu segera memiliki rencana tanggap spesifik agar dapat mengelola klaim tambahan dalam nominal signifikan terkait dengan bencana alam alami secara tepat waktu.
PENGAWASAN MIKROPRUDENSIAL (BERBASIS-ATURAN)	Kerangka kerja Manajemen Risiko Perusahaan (1.5.1): Dari 42 yurisdiksi asuransi yang dinilai, hanya 11 yurisdiksi (26%) yang menerapkan ekspektasi terhadap perusahaan asuransi untuk mengintegrasikan pertimbangan E&S ke dalam kerangka kerja Manajemen Risiko Perusahaan mereka (misalnya, Own Risk Solvency Assessment atau ORSA).	Perusahaan asuransi perlu mengintegrasikan pertimbangan E&S jangka pendek maupun jangka panjang ke dalam kerangka kerja Manajemen Risiko Perusahaan (misalnya, dalam Own Risk Solvency Assessment atau ORSA). Ekspektasi ini dapat berawal dari risiko iklim, tetapi seiring waktu perlu diperluas untuk menangani masalah yang lebih besar seperti kerusakan alam.
	Ekspektasi bagi perusahaan reasuransi (1.5.3): Secara global, hanya tiga lembaga otoritas yang telah menyatakan ekspektasi yang merefleksikan peran spesifik reasuransi sebagai penanggung terakhir sejumlah risiko E&S sistemik. Sisanya sebanyak 39 yurisdiksi yang disurvei belum memasukkan hubungan antara risiko E&S dan sistem reasuransi.	Sepanjang memungkinkan, lembaga otoritas harus memiliki ekspektasi yang spesifik bagi para perusahaan reasuransi, yang merefleksikan peran mereka sebagai penanggung terakhir sejumlah risiko E&S sistemik (seperti yang terkait dengan risiko iklim dan bencana alam).
PENGUNGKAPAN & TRANSPARANSI	Risiko greenwashing (1.6.9): Sebagian besar yurisdiksi EMEA menginkorporasikan masalah <i>greenwashing</i> di dalam ekspektasi mereka terhadap produk investasi yang dijual oleh perusahaan asuransi (terutama karena peraturan yang berlaku di Uni Eropa). Namun, hal ini belum ditemukan di yurisdiksi Amerika dan Asia Pasifik, dan secara umum belum diterapkan untuk produk asuransi tradisional (non-investasi).	Pengawasan terhadap conduct risk dari produk asuransi yang dijual oleh perusahaan asuransi harus mencakup ketentuan terkait penanganan risiko <i>greenwashing</i> , baik untuk produk simpanan maupun untuk produk asuransi tradisional.
PENGAWASAN MAKROPRUDENSIAL	Batas eksposur (1.7.5): Hanya tiga dari 42 yurisdiksi yang disurvei telah meminta atau mewajibkan perusahaan asuransi membatasi eksposur mereka terhadap aktivitas tertentu (misalnya, batu bara termal) guna mencegah risiko E&S sistemik.	Lembaga otoritas perlu mengeluarkan aturan prudensial untuk membatasi eksposur perusahaan asuransi terhadap aktivitas yang paling merusak lingkungan, guna mencegah dan melindungi dari penumpukan risiko sistemik, berdasarkan pertimbangan E&S. Termasuk dalam hal ini, rencana dan target penghentian yang konkret dan harus mencakup aktivitas investasi sekaligus asuransi.
	Mandat asuransi wajib (1.7.6): Hanya empat dari 42 yurisdiksi yang disurvei yang telah menerapkan semacam kewajiban bagi perusahaan asuransi untuk mencakup risiko terkait E&S. Meskipun telah banyak terjadi bencana alam akibat perubahan iklim, ternyata mandat asuransi untuk mencakup isu ini merupakan instrumen kebijakan yang tidak umum.	Lembaga otoritas perlu mengeluarkan mandat asuransi wajib (atau upaya mengikat yang serupa, misalnya moratorium perpanjangan) sehubungan dengan risiko E&S, dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan proteksi (terutama untuk populasi yang rentan secara sosial dan finansial).



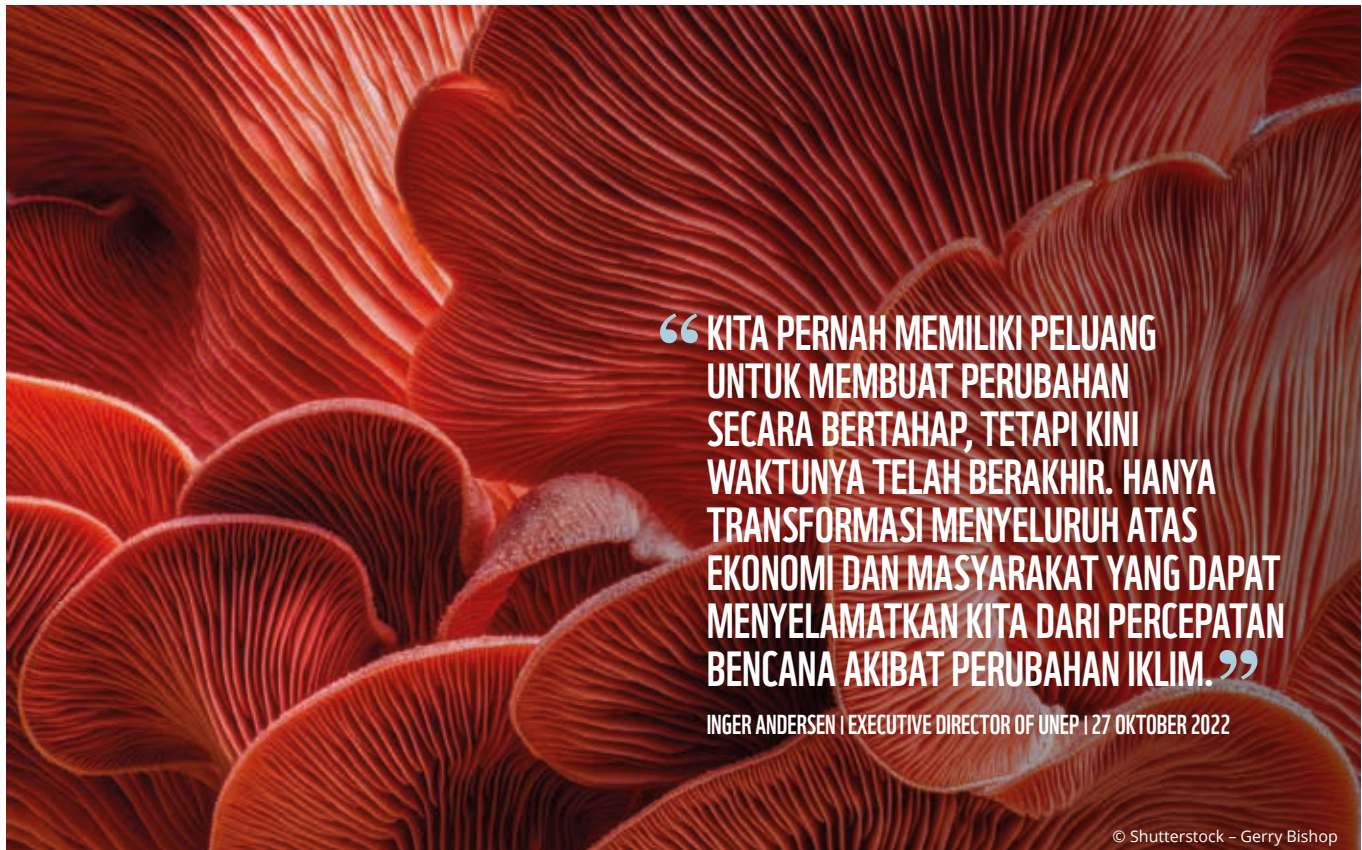
EKOSISTEM PENDUKUNG

KESENJANGAN (GAPS)	TINDAKAN YANG DIHARAPKAN
<p>Kerja Sama Pemerintah – Badan Usaha (3.1.11i): Sembilan dari 42 yurisdiksi telah mengimplementasikan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk mendukung kelanjutan penyediaan asuransi untuk risiko E&S.*</p>	<p>Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) perlu diterapkan untuk mendukung kelanjutan penyediaan asuransi yang mencakup risiko E&S (misalnya, kumpulan premi atau co-insurance pools). Mengingat sifat sistemik dari berbagai risiko E&S, KPBU harus dikembangkan untuk memastikan bahwa risiko ini dapat diasuransikan apabila mekanisme pasar tidak memadai.</p>


Secara keseluruhan, peraturan dan ekspektasi pengawasan lembaga keuangan terkait keuangan berkelanjutan secara perlahan diimplementasikan ke seluruh dunia, kebanyakan dimulai dengan kajian kebijakan terhadap isu iklim. Lembaga keuangan secara umum diminta untuk memasukkan keberlanjutan ke dalam strategi dan tata kelola mereka. Saat ini tengah dikembangkan berbagai alat kebijakan, antara lain ketentuan publikasi seperti Direktif Pelaporan Keberlanjutan Perusahaan (Corporate Sustainability Reporting Directive/CSRD) di Uni Eropa, prototipe publikasi dari International Sustainability Standards Board (ISSB), proposal publikasi aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan perubahan iklim dari Securities and Exchange Commission (SEC) di AS, atau rekomendasi pengungkapan risiko iklim dari TCFD. Namun demikian, tindakan prudensial yang konkret masih sedikit ditemukan. Meskipun sejumlah yurisdiksi terkemuka telah mulai mengintegrasikan pertimbangan risiko dan dampak ke dalam kebijakan dan proses, masih banyak yang perlu dilakukan untuk menciptakan persaingan yang adil di tingkat global, dengan memasukkan praktik-praktik terbaik terbaru yang telah dibahas dalam laporan ini.

Mengingat urgensi untuk bertindak dalam menghadapi krisis iklim dan lingkungan kian memuncak, WWF berharap bank sentral dan otoritas keuangan dapat mempercepat mobilisasi kebijakan moneter serta alat kebijakan dan prudensial untuk mendukung transisi yang tepat waktu dan teratur menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Selain itu, diharapkan juga adanya ekspektasi pengawasan yang dapat berdampak lebih jauh dari sekadar penanggulangan perubahan iklim dan mencakup topik sosial dan lingkungan yang lebih luas. Intervensi awal secara masif serta koordinasi internasional akan menjadi kunci keberhasilan dalam satu dekade yang kritis ini.

Kami berharap bahwa kerangka kerja dan tracker SUSREG akan berkontribusi terhadap penguatan dan harmonisasi praktik-praktik keberlanjutan yang dilaksanakan bank sentral dan otoritas keuangan di seluruh dunia dalam mengadopsi kebijakan yang akan berdampak positif terhadap alam pada tahun 2030, membatasi pemanasan global hingga 1,5°C, dan mencapai emisi nol-bersih (net-zero emissions) pada tahun 2050 atau lebih cepat, sebagai jangkar utama dari mandat mereka.



* Ada kemungkinan penghitungan-ganda karena US National Flood Insurance Program juga berlaku untuk yurisdiksi Negara Bagian California dan New York.



**MISI KAMI ADALAH
MENGHENTIKAN DEGRADASI
LINGKUNGAN HIDUP DI BUMI
DAN MEMBANGUN MASA
DEPAN DI MANA MANUSIA
HIDUP SELARAS DENGAN ALAM**

© Shutterstock – PERNANITFOTO



Working to sustain the natural world for the benefit of people and wildlife.

together possible™ panda.org

REFERENSI

1. https://wwf.panda.org/discover/our_focus/finance/greening_financial_regulation/
2. https://wwf.panda.org/discover/our_focus/finance/greening_financial_regulation/?6242441/Central-banks-and-financial-supervisors-urged-to-step-up-action-on-nature-and-climate
3. https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/wwf_gfri_roadmap__august_2022_lores.pdf
4. https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/wwf_technical_background_report_2022.pdf
5. <https://www.susreg.org/>
6. https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/wwf_gfri_roadmap_2022_nov_2022.pdf